KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal Pansus Haji: Kecurigaan Gus Yahya Dijawab Imin, Dasco, Nusron
Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-7

Soal Pansus Haji

Kecurigaan Gus Yahya Dijawab Imin, Dasco, Nusron

KEKHAWATIRAN Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Haji DPR mengarah ke urusan pribadi, dijawab Senayan. Sejumlah politisi di Parlemen menegaskan, Pansus Haji bagian dari tugas wakil rakyat. Tak ada urusan pribadi di balik pembentukan Pansus Haji.

Anggota Pansus Haji DPR, Nusron Wahid meminta Gus Yahya-sapaan bos PBNU, tidak perlu khawatir. Kata Nusron, semua keputusan yang dihasilkan DPR berdasarkan hasil rapat paripurna yang disetujui fraksi-fraksi. Bukan keputusan masing-masing anggota. Apalagi, cuma karena masalah pribadi yang kemudian melahirkan sebuah keputusan resmi.

VERSI DIGITAL ARTIKEL INI, SILAKAN SCAN QR CODE

♦ BERSAMBUNG KE HAL 7

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Nusron: Pansus Bagian Tupoksi DPR Awasi Kinerja Eksekutif

Kecurigaan Gus Yahya

... DARI HALAMAN 1

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf, di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron, dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Nusron bilang, tugas legislatif adalah mengawasi kinerja lembaga eksekutif. Bila eksekutif dianggap melenceng menjalankan tugasnya, maka DPR berhak memintai keterangan. Hal itu, diatur sesuai konstitusi. "Jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," tambahnya.

Dia meminta agar semua elemen kelembagaan, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk saling menghormati tupoksinya masing-masing. "PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR," tekan politisi partai Golkar itu.

Nusron menjamin keputusan DPR membentuk Pansus Haji bukan didasari untuk membela kepentingan segelintir pihak. "Ini urusan DPR dengan Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas). Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan," sebutnya.

Dia lantas menegaskan pihaknya tidak serta merta membuat produk hukum. Pasti ada dasarnya. Terutama adanya indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut, lanjut anggota Komisi VI DPR itu, nantinya akan diverifikasi dalam proses angket yang berjalan.

"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja, tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan Menteri Agama," tegas dia.

Kekhawatiran Gus Yaqut juga dijawab Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Imin-sapaannya, membantah tudingan Gus Yahya yang menyebut Pansus Haji dilatarbelakangi masalah pribadi dan untuk menyerang PBNU.

"(Pansus Haji) nggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU, Paham!" ujar Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar di akun X pribadinya @*cakiminNOW*, Senin (29/7/2024).

Menurut Cak Imin, Pansus Haji berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai. Menurut dia, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII DPR bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus.

Terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antri berpuluh tahun. "Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," tandas politisi yang saat ini hubungannya sedang tidak baik dengan Gus Yahya.

Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut berbicara. Dasco bilang, pansus tidak akan menggelar rapat pada masa reses persidangan ini.

"Dalam rapat pimpinan (rapim) dan rapat Bamus sudah diputuskan untuk dijalankan pada masa persidangan mendatang. Mengingat, pada saat itu sudah memasuki masa reses," ungkap Dasco di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/7/2024) mengesahkan pembentukan Pansus Haji. Sebanyak 35 anggota turut meneken pembentukan pansus itu. Adapun pansus ini diisi 30 orang yang berasal dari seluruh fraksi DPR. Rinciannya: 7 dari PDIP, Golkar dan Gerindra masing-masing 4, PKB, NasDem, Demokrat, PKS masing-masing 3 orang, 2 dari PAN, dan 1 dari PPP.

Namun, pembentukan Pansus Haji DPR ini dikritik keras Gus Yahya. Mantan anggota Watimpres itu menuding, pembentukan Pansus Haji karena urusan pribadi. Tepatnya, urusan pribadi antara dirinya dengan Imin dan juga Gus Yaqut. Mengingat saat ini, hubungan antara PBNU dengan PKB yang dipimpin Imin sedang tidak baik.

"Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024). ■ UMM